

BAB VI

KESIMPULAN

Gempa tahun 1926 dengan episentrum Padangpanjang dan sekitarnya, respons atas gempa kala itu mengindikasikan partisipasi tanpa pamrih jika melihat dari sudut pandang kepentingan politik, uang, dan eksistensi. Artinya lebih dominan respons dilandasi rasa kemanusiaan bila membandingkan dengan respons gempa 2009. Pada gempa 1926, pemerintah Hindia Belanda yang dipersepsikan sebagai penjajah, memperlihatkan mental antara ‘penjajah-dijajah’ sirna seiring dengan semangat penanganan yang berbasis kemanusiaan. Memang ada selentingan, rasa diskriminasi dari sisi tindakan secara pribadi (atau bantuan yang berbasis hierarki), tapi bila membandingkan dengan penanganan gempa 2009, dimana sudah dibekali regulasi yang jelas, dan struktur penanganan yang kentara, penanganan 1926 memberi pembelajaran yang baik dalam menghadapi gempa.

Namun dibalik struktur yang di desain, ada banyak kepentingan didalamnya. Selain kepentingan atas kemanusiaan, juga ada kepentingan atas kelompok, pribadi, dan kepentingan lainnya. Dampak dari semua ini dirasakan oleh para korban gempa itu sendiri. Lihat bagaimana, bantuan dari masyarakat (baca: pemirsa), yang dikelola oleh stasiun televisi, kemudian digunakan untuk membantu pembangunan infrastruktur seperti sekolah, dengan nama merk logo mereka yang sangat dominan. Sehingga orang awam tentu berpikir bahwa yang membantu tersebut adalah stasiun televisi tersebut, bukan pemirsanya. Artinya, gempa pun menjadi arena promosi bagi suatu perusahaan dengan strategi penyaluran bantuan.

Pada gempa 1926, sekat-sekat secara kesukuan, agama, dan juga struktur strata lain dalam polarisasi penanganan tidak kentara, untuk tidak mengatakan tidak

ada. Penanganan gempa 1926, antitesis dari sebuah era penjajahan, yang dipersepsikan eksploitasi alam dan kemanusiaan tanpa rasa kemanusiaan. Militer menjadi garda terdepan dalam penanganan, sebab satu-satunya ‘alat negara (kolonial)’ yang terlatih dan siap dikerahkan dalam urusan evakuasi pada fase darurat. Mereka bekerja berdasarkan sistem komando, sehingga di lapangan betul-betul menjadi andalan masyarakat dalam menyingkirkan puing-puing bangunan yang runtuh, dan menemukan keluarga yang terhimpit puing bangunan tersebut. Militer pula yang berperan besar menjaga kestabilan terutama masalah keamanan di masa darurat.

Melihat respons otoritas dan juga kalangan tertentu selepas masa darurat, gempa 1926 menunjukkan kepekaan sosial yang begitu tinggi tanpa diselimuti kepentingan. Bagaimana rumah bola menjadi ruang berkumpul bagi kalangan Eropa terutama Belanda, tidak sekedar tempat pesta atau berkumpul tapi juga aktivitas filantropi membantu korban gempa. Komite-komite lahir dengan tujuan akhir menampung bantuan untuk korban gempa. Otoritas juga demikian, mengambil alih masa rehab-rekon, dengan mengerucutkan pada departemen-departemen tertentu sesuai dengan tupoksi masing-masing. Semuanya berjalan tanpa diboncengi kepentingan politik. Alur penanganan gempa 1926 juga berjalan dalam struktur yang simpel dan tidak rumit.

Sementara gempa tahun 2009, semua serba terorganisir. Pemerintah bertindak melalui kelembagaan yang sudah ada, dan kemudian juga membentuk lembaga khusus seperti Tim Pendukung Teknis Teknis (TPT). Tindakan juga semakin kuat karena ada regulasi seperti UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang memayungi. Organisasi penanganan yang diciptakan, nyatanya menghadirkan penyimpangan-penyimpangan seperti kasus korupsi dana gempa.

Sehingga bisa dikatakan, organisasi penanganan gempa 2009, banyak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, dan kepentingan kelompok tertentu.

Tindakan-tindakan atas reaksi gempa 2009, juga banyak dilakukan oleh lembaga non pemerintah, baik itu Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) atau pun partai politik. Secara implisit, LSM pada akhirnya menunjukkan, orientasi program berdiri di atas kaki kemanusiaan. Program-program dilabeli kemanusiaan, karena hal demikian paling menjual untuk ranah kebencanaan. Sementara partai politik atas nama kemanusiaan menyalurkan bantuan, tanpa menanggalkan label kepartaian. Memasuki pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2010, politisi bermanuver atas bantuan kemanusiaan di kantong-kantong korban gempa. Semua saling menunjukkan eksistensinya.

Persoalan korupsi uang bantuan gempa 2009, hingga pelbagai kepentingan yang menyelimuti penanganan gempa 2009, memberi gambaran penanggulangan bencana gempa di era sekarang (modern) belum memberi jawaban mitigasi yang sudah kuat, baik dari aspek kesiapsiagaan, transparansi, akuntabilitas, dan utamanya keberpihakan pada korban. Padahal, gempa 2009, bukanlah pertama bagi Sumatera Barat, bisa dikatakan sudah berulang-ulang. Gempa secara prinsip pun tidak berubah, sebagai bencana yang datang tiba-tiba tanpa bisa ditebak secara pasti. Pastinya datang berulang-ulang, dengan sejarah berulang secara aspek pengalaman. Sehingga melihat bagaimana penanganan gempa tahun 1926, sebagai kejadian yang cukup besar di masa kolonial, idealnya sangat relevan untuk dijadikan referensi pada kejadian gempa berikutnya, tidak terkecuali 2009 tersebut.

Melihat benang merah prinsip penanganan yang berjalan antara dua kejadian gempa di zaman yang berbeda, tentu ada sisi kekurangan, di samping ada sisi kekuatan yang sebetulnya harus diserap pada respons gempa-gempa selanjutnya.

Mestinya ada yang membunuh dan membungkus menjadi mitigasi yang lebih baik kedepannya. Gempa 1926, meski belum ada regulasi yang khusus mengatur soal penanganan, setidaknya menghadirkan penanganan yang tidak begitu rumit dan birokratis, empati tanpa tepi, dan azas transparansi dalam alur bantuan. Sisi ini mungkin masih aktual untuk diserap dalam mitigasi kedepannya. Mitigasi yang terus diperkuat melalui ilmu pengetahuan yang berkembang dan pelbagai pelatihan bagi pelaku kebencanaan, negasi pengalaman gempa 1926 dan gempa 2009, tentu suatu hal yang bisa melemahkan mitigasi itu sendiri. Pada gempa 1926, banyak kearifan lokal yang bisa diserap dalam menangkal ancaman gempa, sementara pada gempa 2009, manajemen gempa yang digunakan tentu sudah berbasis pada perkembangan ilmu kebencanaan, sehingga tinggal mengaplikasikannya dengan baik dan benar.

Penjabaran pengalaman penanganan gempa dalam aspek pascabencana berdasarkan fase tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penelitian ini, semuanya bermuara bagaimana menguatkan mitigasi. Sebab, gempa adalah satu-satunya bencana yang sejauh ini belum bisa diprediksi secara tepat dari sudut geologis, sehingga belajar dari penanganan masa lalu tentu berdaya guna untuk meminimalisir risiko yang lebih besar.

